

REFORMASI DAN KETAHANAN NASIONAL

Oleh : H. Budisantoso. S

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah peradaban manusia tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan serta tatanan internasional terus mengalami perubahan, baik secara revolusioner maupun evolusioner. Perubahan secara revolusioner bertujuan mengganti/merubah secara mendasar sistem yang lama yang biasanya disertai dengan pergolakan yang menelan korban jiwa dan harta benda yang besar. Contohnya : Revolusi Perancis, Revolusi Rusia dan Revolusi Kemerdekaan Amerika Serikat. Sedangkan perubahan secara evolusioner bertujuan memperbaiki sistem yang telah ada secara damai dan tahap demi tahap.

Bangsa Indonesia mengalami revolusi dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1965. Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut Kemerdekaan dari penjajah dan mempertahankannya. Kemudian timbul berbagai ancaman untuk merubah Pancasila dan memecah belah NKRI berhasil diatasi oleh bangsa Indonesia.

Sejak ditumpasnya pemberon-

takan G 30 S/PKI, pada tahun 1966 Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen melalui pembangunan nasional secara evolusioner. Pada awal pembangunan nasional sampai dengan akhir Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) telah menunjukkan berbagai keberhasilan terutama dalam mengangkat harkat dan martabat hidup manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun sejak awal tahun

1990-an, karena terjadinya penentuan kebijaksanaan yang kurang tepat, krisis moral dan etika Pancasila, ditambah dengan terjadinya krisis moneter regional, maka terjadi kemerosotan kehidupan masyarakat Indonesia. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya gerakan reformasi yang menuntut perbaikan segenap aspek kehidupan politik, ekonomi dan hukum. Dari pengamatan terhadap berbagai pendapat para tokoh reformis dan yang mengaku reformis, serta berbagai gejolak yang timbul, hakekat reformasi, tujuan dan arahnya sekarang ini masih kabur (belum jelas). Apakah cenderung ke arah revolusioner atau menghendaki perubahan secara evolusioner dan damai.

Para pendahulu bangsa Indonesia (para senior) telah mengembangkan Wawasan Nasional Indonesia untuk mencapai Tujuan Nasional, yang dinamakan Wawasan Nusantara (Wasantara), yang mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional, serta menjamin kepentingan nasional Indonesia. Sedangkan Ketahanan Nasional (Tannas) sebagai kondisi dinamis bangsa yang harus terus dibina dan dikembangkan agar selalu dapat diatasi segala Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG) yang timbul. Wasantara dan Tannas dikembangkan berlandaskan Pancasila, berfungsi untuk membina kesadaran persepsi dan kesepakatan bangsa Indonesia dalam

pengembangan kekuatan nasional guna mencapai Tujuan Nasional, sehingga tercipta keterpaduan sikap dan upaya bangsa Indonesia. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional, Wasantara dan Tannas berkedudukan sebagai Doktrin Dasar Nasional.

Dalam tulisan ini dibahas *hakekat* reformasi, pemahaman Wasantara dan Tannas sebagai Doktrin Dasar Nasional, analisis keterkaitan (relevansi) antara reformasi dengan Tannas, serta upaya pemantapan Tannas.

HAKEKAT REFORMASI

Latar Belakang

Sejak pertengahan tahun 1997 sampai saat ini, sudah setahun lebih bangsa Indonesia menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang sangat berat. Krisis ini ditandai dengan makin terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS, membengkaknya hutang luar negeri yang di luar kemampuan membayar baik oleh pemerintah maupun swasta, serta naiknya harga barang dan jasa produk impor dan juga produksi dalam negeri, termasuk Sembako.

Akibat krisis moneter dan ekonomi sebagian besar perusahaan swasta terpaksa gulung tikar atau mengurangi kegiatannya, sehingga banyak terjadi PHK, dan makin meningkatkan jumlah pengangguran.

Jumlah pengangguran ini masih bertambah lagi dengan ex TKI bermasalah yang diusir dari negara tetangga, mengakibatkan permasalahan sosial yang makin luas dan kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Naiknya harga barang dan jasa, makin menurunnya daya beli masyarakat golongan menengah dan bawah, disertai "issue" tentang kelangkaan sembako mengkulminasikan ketidakpercayaan kepada Pemerintah, yang cenderung menghapus segala keberhasilan pembangunan selama 32 tahun. Kondisi yang demikian itu memicu adanya gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Gerakan reformasi yang murni dari mahasiswa yang menuntut untuk mengadakan perbaikan, ternyata juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak dan kelompok masyarakat untuk kepentingannya, yang memicu berbagai kerusuhan massal yang menelan korban jiwa dan harta benda yang sangat besar. Kemudian tokoh-tokoh reformasi melancarkan desakan agar Presiden Soeharto "lengser keprabon" baik secara langsung maupun melalui DPR.

Presiden Soeharto yang masih memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh, menyatakan berhenti selaku Presiden, suatu sikap dan tindakan selaku. Negarawan yang berusaha menghindarkan pecahnya persatuan nasional dan pertumpahan darah. Kemudian sesuai dengan konstitusi/ UUD 1945, Wapres B.J. Habibie mengangkat sumpah di depan

Mahkamah Agung sebagai Presiden RI yang ke-3 di Istana Merdeka. Di tengah-tengah berbagai pendapat pro dan kontra, maraknya usaha mendirikan partai oleh berbagai golongan/ kelompok masyarakat, serta tuntutan untuk segera menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) MPR, Presiden B.J. Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunan terus berusaha melaksanakan reformasi secara bertahap terutama dalam memenuhi kebutuhan Sembako, serta berdasarkan kesepakatan dengan Pimpinan DPR, menyiapkan agenda politik, yaitu SI MPR pada akhir 1998, dan Pemilu pada pertengahan 1999 dengan segala perangkatnya, serta SU MPR pada akhir 1999.

Dalam rangka mengidentifikasi tujuan murni dari reformasi sesuai aspirasi rakyat pada umumnya, perlu dianalisis faktor dominan Penyebab Krisis yang memicu gerakan reformasi.

Faktor Dominan Penyebab Krisis:

Dampak Pelaksanaan dari Kebijakan Pembangunan Nasional.

Selama PJP I dan awal PJP II, Pembangunan Nasional bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan

penggerak utama pembangunan. Bila ditinjau dari segi konsepsi, pemilihan kebijaksanaan tersebut tidak keliru, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan antara lain terjadinya pemusatan kekuasaan politik dan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), laporan ABS, serta pemusatan kekuatan ekonomi pada golongan/ kelompok tertentu, sehingga menimbulkan "counter productive" terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditempuh kebijaksanaan memberikan kemudahan mendirikan bank dan kemudahan investasi baik PMDN maupun PMA, serta mengalirnya modal dalam bentuk pembelian saham dan hutang dari luar negeri. Kebijakan ini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun karena terjadi investasi pada sektor yang kurang tepat, industri yang dikembangkan tidak berbasis kepada potensi sumber daya alam yang dimiliki (resource based industry), terjadinya salah urus, KKN, dan adanya unsur spekulasi, mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi yang sangat lebar dan fondamen perekonomian Indonesia tidak kokoh, serta sangat tergantung pada bahan baku/ komponen impor.

Dampak dari Krisis Moneter Regional Asia.

Krisis moneter yang melanda kawasan Asia mengakibatkan merosotnya, nilai mata uang negara-negara Asia, termasuk makin terpuruknya nilai rupiah terhadap dollar AS. Merosotnya nilai rupiah mengakibatkan membubunginya harga barang dan jasa, serta membengkaknya hutang luar negeri pemerintah dan swasta serta kesulitan impor dalam memperoleh bahan baku industri dan berbagai suku cadang. Banyak perusahaan swasta yang gulung tikar, banyak bank bermasalah yang terpaksa dilikwidasi, dan sebagian lagi dalam proses penyehatan oleh BPPN. Negara tetangga yang juga mengalami krisis moneter mengusir TKI bermasalah (TKI illegal), sehingga makin menambah jumlah penganggur dan rakyat miskin.

Dampak dari rekayasa politik

Dalam menjamin kelangsungan dan keberhasilan pembangunan nasional, serta stabilitas politik perlu kekuatan politik dengan mayoritas tunggal. Untuk itu telah dilakukan berbagai rekayasa agar terjadi mayoritas tunggal pada salah satu kekuatan politik (Golkar) mengabaikan hak-hak politik rakyat, yang cenderung melestarikan jabatan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Kondisi ini mengakibatkan proses demokratisasi berlangsung tersendat-sendat, proses politik kurang terbuka serta membudayanya laporan ABS, yang menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan

terhadap pemerintah, lembaga perwakilan dan lembaga politik lainnya, termasuk ABRI yang terseret dalam rekayasa politik ini.

Kelangkaan Sembako

Meningkatnya harga barang dan jasa termasuk sembako yang disertai dengan kelangkaan sembako di pasar serta menurunnya daya beli masyarakat, mengakibatkan keresahan dan kepanikan masyarakat. Produksi pangan dalam negeri khususnya beras mengalami penurunan akibat kebijaksanaan pengadaan pangan yang kurang tepat, gangguan cuaca dan makin menyusutnya lahan sawah/pertanian, sedangkan impor beras juga mengalami berbagai kesulitan disertai kesulitan distribusi. Bahan kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan adalah susu bubuk untuk balita, obat-obatan, suku cadang kendaraan, harganya juga melambung tinggi.

Kerusuhan Massal

Gerakan reformasi yang berdasarkan aspirasi rakyat sesuai hati nurani bertujuan agar kehidupan nasional lebih demokratis dalam suasana keterbukaan, adil dan makmur, bersih dari KKN dan ABS. Namun gerakan reformasi ini telah dimanfaatkan oleh oknum/ golongan tertentu untuk kepentingannya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oknum/ golongan tersebut dengan menghasut massa untuk

menimbulkan berbagai kerusuhan massal, pembakaran, perusakan, penjarahan, perkosaan dan pembunuhan yang diwarnai anti Cina, telah menelan korban jiwa dan harta benda yang sangat besar, terutama hancurnya sarana dan prasarana ekonomi. Bentrokan antara pengunjung rasa/ mahasiswa dengan aparat keamanan terjadi di beberapa tempat yang mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak.

Kerusuhan massal yang mencapai puncaknya pada tanggal 14 dan 15 Mei 1998 di Jakarta, telah mengakibatkan citra buruk terhadap Indonesia, sehingga investasi asing dan turis asing yang sangat dibutuhkan bagi perekonomian nasional, merosot sangat drastis. Kegiatan ekonomi perdagangan, produksi dan distribusi barang dan jasa sangat terhambat, serta banyak terjadi pelarian modal (*capital flight*) ke luar negeri. Citra buruk ini lebih diperparah lagi oleh adanya issue terjadinya perkosaan besar-besaran terhadap wanita keturunan Cina pada kerusuhan pertengahan Mei 1998. Berbagai perwakilan R.I. di luar negeri didemonstrasi oleh kelompok etnis Cina. Kegiatan unjuk rasa dengan berbagai tuntutan, termasuk tuntutan untuk memisahkan diri (separatis), yang sering diwarnai tindak kekerasan masih terus berlangsung sampai saat ini diberbagai daerah.

Tujuan Reformasi

Dari uraian tentang latar belakang dan faktor dominan penyebab krisis, bahwa gerakan reformasi pada hakekatnya bertujuan dan menuntun perbaikan kehidupan nasional, terutama kehidupan politik yang lebih demokratis dalam keterbukaan, dan mengindahkan HAM, serta bersih dari KKN dan ABS, kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan makur, kepastian dan tegaknya hukum yang berdasarkan keadilan. Dari pernyataan dan tuntutan para mahasiswa dan tokoh reformasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa reformasi hendaknya berlangsung secara damai dengan tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI, dengan catatan bahwa pasal-pasal UUD 1945 tetap terbuka untuk disempurnakan.

Hujat menghujat dan kerusuhan massal berupa penjarahan, pembunuhan, dan perkosaan bukan termasuk dalam kerangka/ bingkai reformasi. Demikian pula timbulnya kembali gerakan separatis dan upaya penggantian dasar negara Pancasila, juga bukan merupakan tujuan reformasi. Bila terjadi penggantian Pancasila dan mentolerir gerakan separatis, berarti menghancurkan kesatuan bangsa Indonesia dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dari Sabang sampai Merauke yang telah diikrarkan oleh para pendiri NKRI.

POKOK-POKOK PEMAHAMAN WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL

Bangsa Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara untuk mewujudkan Cita-cita dan Tujuan Nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

- **Alinea 2** (Cita-cita Nasional) : negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
- **Alinea 4** (Tujuan Nasional) : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wawasan Nasional dalam mencapai Tujuan Nasional dinamakan Wawasan Nusantara yang dikembangkan dan dirumuskan berdasarkan falsafah Pancasila dan kondisi wilayah negara, sejarah perjuangan, dan sosial budaya bangsa, serta lingkungan strategis yang mempengaruhi. Di samping kesepakatan yang mantap tentang Wawasan Nasional, diperlukan

kesepakatan tentang konsep pengembangan kekuatan untuk mengatasi TAHG dalam rangka mencapai Tujuan Nasional, yang dinamakan Ketahanan Nasional.

Wawasan Nusantara

Wasantara adalah Wawasan Nasional Indonesia dalam mencapai Tujuan Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung nilai-nilai keutuhan (integralistik), kekeluargaan, dan keserasian. Wasantara dikembangkan dengan mempertimbangkan :

- Kondisi geografis wilayah NKRI yang dikenal dengan nama Nusantara yang terdiri dari perairan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak pada khatulistiwa, diantara 2 benua dan 2 samodera, dengan segala kekayaan alam dan ciri-cirinya, merupakan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia.
- Rakyat Indonesia yang berjumlah 200 juta terdiri dari beranekaragam suku, etnis, agama, bahasa, budaya dan istiadat, sebagai penghuni Nusantara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak homogen seperti bangsa Jepang, Jerman dan lain-lainnya, tetapi bangsa yang plural.
- Sejarah perjuangan bangsa yang merupakan pengalaman pahit, terpecah belah diadudomba, dan dijajah oleh bangsa lain lebih dari 300 tahun.

Dari uraian di atas, maka Wasantara mengajarkan mawas ke dalam agar bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan pada segenap aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk mengutamakan kelestarian lingkungan hidup tanah air Indonesia. (periksa rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998) Sedangkan mawas ke luar, menjamin kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa, dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang adil dan sejahtera. Kepentingan nasional Indonesia yang utama (*the main national interest*) adalah : tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; terjaminnya integritas dan identitas nasional, serta berhasilnya pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan kesatuan, kelestarian lingkungan hidup dan jaminan terhadap kepentingan nasional, maka pencapaian Tujuan Nasional akan tersendat-sendat dan bahkan dapat terjadi penyimpangan, kemunduran atau "*setback*" dalam pembangunan nasional dan kehidupan nasional.

Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,

dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai Tujuan Nasional. Hakekat Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai Tujuan Nasional.

Dalam uraian tersebut di atas, Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Proses untuk mewujudkan kondisi tersebut memerlukan konsepsi yang dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional (Konsepsi Tannas).

Konsepsi Tannas adalah konsepsi pengembangan kemampuan dan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wasantara. Konsepsi Tannas merupakan sarana untuk mewujudkan kemampuan dan kekuatan nasional guna menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Hakekat Konsepsi Tannas adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam

kehidupan nasional.

Ketahanan Nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila, UUD 1945 dan berpedoman kepada Wasantara dalam segenap aspek kehidupan nasional secara terpadu, utuh menyeluruh. Konsepsi Ketahanan Nasional memiliki asas dan ciri/ sifat yang harus digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikannya. Asas ketahanan Nasional adalah kesejahteraan dan keamanan; komprehensif integral; mawas ke dalam dan keluar; kebersamaan/kekeluargaan. Sedangkan ciri/sifatnya adalah dinamis; kewibawaan; mengutamakan konsultasi dan kerjasama; mandiri.

Ketahanan Nasional mencerminkan keterpaduan Delapan Gatra (Astagatra) kehidupan nasional, yaitu Trigatra alamiah meliputi Geografi, Kekayaan alam dan Kependudukan; Pancagatra sosial meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya (Sosbud) dan Pertahanan Keamanan (Hankam). Ketahanan Nasional pada dasarnya tergantung kepada kemampuan bangsa Indonesia dalam memelihara dan memanfaatkan Trigatra untuk meningkatkan kondisi Pancagatra dalam wujud Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud dan Hankam. (periksa rumusan Ketahanan Nasional dalam GBHN 1993).

Peranan Ketahanan Nasional dan Konsepsi Ketahanan Nasional dalam

kehidupan nasional dan pembangunan nasional adalah :

- Tannas merupakan tolok ukur kondisi keberhasilan penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
- Tannas yang tangguh akan lebih mendorong laju pembangunan nasional dan keberhasilan pembangunan nasional akan lebih meningkatkan ketangguhan Tannas.
- Konsepsi Tannas merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
- Konsepsi Tannas sebagai pola dasar pembangunan nasional yang dilakukan melalui per-tahapan Repelita.

Implementasi Doktrin Dasar Nasional dalam Kehidupan Nasional.

Ketahanan Nasional dapat dibedakan dengan Wawasan Nusantara, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ketahanan Nasional harus dibina berdasarkan Wawasan Nusantara.

Kehidupan nasional secara universal biasanya distratakan menjadi supra struktur, infra struktur dan sub struktur. Dalam kehidupan nasional Indonesia dikenal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Implementasi Doktrin Dasar, Ketahanan Nasional meliputi implementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Implementasi dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Wasantara dan Tannas telah diajarkan dan dimasyarakatkan melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, namun karena besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Indonesia, serta maraknya berbagai pengaruh yang kurang menguntungkan, maka pemahaman dan penghayatan Wasantara dan Tannas dalam kehidupan bermasyarakat dirasakan belum mantap.

Kehidupan bermasyarakat masih mengandung kerawanan latent masalah sara (suku, agama, rasial dan antar golongan), primordialisme, dan potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai dengan tahun 1998 masih terjadi beberapa kerusuhan massal yang bersumber pada masalah sara ditambah dengan masalah kesenjangan sosial ekonomi. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa kerukunan hidup bermasyarakat, kerukunan hidup infra dan antar umat beragama, dan solidaritas sosial sebagai penopang persatuan dan kesatuan masih belum mantap. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adanya oknum subversif yang turut bermain dengan memanfaatkan kerawanan tersebut,

Dalam penyelenggaraan hubungan internasional, Wasantara dan Tannas juga merupakan acuan yang diwujudkan ke dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif diabdikan kepada kepentingan nasional. Dengan perubahan situasi dunia yang makin cepat, menimbulkan tantangan, peluang, kendala dan ancaman baru, paradigma baru, serta era baru. Oleh karena itu politik luar negeri perlu di sesuaikan dan diaktualisasikan untuk menjamin kepentingan nasional

Relevansi Reformasi dengan Ketahanan Nasional

Reformasi yang telah bergulir dan menjadi tuntutan nurani dan aspirasi rakyat Indonesia bila tidak tepat menanganinya dan tidak mampu memberikan tanda-tanda kearah perbaikan, terutama dalam aspek politik, ekonomi dan hukum, akan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan bahkan dapat membahayakan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1954. Reformasi pada akhirnya harus makin mendekatkan terwujudnya Cita-cita Nasional dan Tujuan Nasional Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam menghadapi berbagai krisis saat ini, kita harus kembali kepada kesatuan cara pandang dan kesatuan pemikiran yang sesuai dengan doktrin dasar nasional Wasantara dan Tannas, serta mampu

menciptakan suatu kondisi kehidupan yang mantap yang terintegrasi, sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang sedang maupun akan dihadapi, serta mampu memanfaatkan peluang dan potensi/ kekuatan yang ada. Oleh karena itu pemantapan Ketahanan Nasional dalam menyukseskan reformasi sangat penting. Lemahnya Ketahanan Nasional dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian Tujuan Nasional, bahkan dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan R.I. dan bangsa Indonesia.

Dalam rangka membahas Tannas guna menyukseskan reformasi, kita tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh globalisasi menjelang abad XXI ini, serta perkembangan kehidupan nasional. Dari analisis terhadap globalisasi dan perkembangan kehidupan nasional akan dapat diidentifikasi tantangan, ancaman, dan kendala yang harus diatasi dan peluang yang dapat dimanfaatkan.

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL

Kalau kita amati sejarah dunia dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sesungguhnya era globalisasi telah mulai pada abad XVI. Akibat industrialisasi di Eropa Barat dan timbulnya Kapitalisme, diperlukan daerah pasar dan pemasok bahan

mentah di luar Eropa. Globalisasi pada waktu itu berwujud Kolonialisme dan Imperialisme, yang berakibat Nusantara menjadi daerah jajahan bangsa lain lebih dari 300 tahun.

Era globalisasi pada saat ini sampai awal abad XXI pada hakekatnya adalah globalisasi ekonomi dalam bentuk perdagangan bebas dan globalisasi informasi dalam bentuk Sistem Informasi seperti Internet, siaran Radio dan TV Internasional, dan lain-lainnya. Perdagangan bebas barang, jasa, modal, dan uang, serta sistem informasi tidak mengenal batas-batas negara. Era globalisasi juga mengakibatkan dunia dirasakan semakin kecil (mengerut), sehingga menimbulkan kesadaran umat manusia untuk turut serta menjamin ketertiban dunia dan kelestarian lingkungan hidup. Kesadaran ini menimbulkan tuntutan hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, dan kelestarian lingkungan hidup. Tuntutan hati nurani manusia ini tidak menutup kemungkinan digunakan dalih untuk menekan negara-negara berkembang oleh negara industri maju dengan menggunakan standar ganda (*double standard*).

Era globalisasi awal abad XXI menimbulkan tantangan, peluang dan kendala, serta ancaman dalam bentuk baru, yang sangat berbeda dengan pada masa lalu. Bersamaan dengan dampak era globalisasi di kawasan Asia Tenggara, juga sudah mulai terasa dalam kehidupan

nasional Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 sampai saat ini, bangsa Indonesia menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang sangat berat, kemudian berlanjut dengan krisis kepercayaan.

Krisis kepercayaan yang dimulai sejak masa Presiden Soeharto terus berlangsung sampai saat ini, baik kepercayaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sementara itu masyarakat sedang dalam *euforia* berdemokrasi dalam bentuk pendirian partai yang saat ini sudah kurang lebih 100 partai, unjuk rasa, maraknya kembali primordialisme, dan separatisme, yang bila tidak terkendali akan dapat menjurus terjadinya kemerosotan kehidupan nasional, dan disintegrasi bangsa dan NKRI. Untuk mengatasi segenap permasalahan tersebut bangsa Indonesia harus memiliki Ketahanan Nasional yang cukup tangguh.

Dalam rangka membina Ketahanan Nasional guna menyukseskan reformasi yang juga dipengaruhi oleh globalisasi, serta perkembangan situasi dan kondisi di dalam negeri Indonesia, perlu diidentifikasi tantangan, ancaman dan kendala yang harus diatasi, serta peluang-peluang yang harus dimanfaatkan.

Tantangan terhadap Pancasila

Era globalisasi, khususnya era perdagangan bebas cenderung menuju perekonomian liberal

(ekonomi pasar) dan bersifat kapitalistik, individualistik dan materialistik yang dapat menggeser nilai-nilai idealisme yang terkandung dalam Pancasila. Kecenderungan ini bila tidak dapat dikendalikan akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang makin melebar, yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ancaman terhadap NKRI sebagai Negara Bangsa (Nation State)

Dengan makin meningkatnya perdagangan bebas melampaui batas negara, diramalkan oleh pakar dari luar negeri bahwa akan terjadi perpecahan pada Negara Bangsa, yang sudah terjadi pada Uni Soviet, Yugoslavia, dan Chekoslovakia. Gerakan reformasi di Indonesia juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk maraknya kembali primordialisme, berbagai kerusuhan massal yang menggoncangkan stabilitas nasional, serta timbulnya kembali gerakan separatistis di Timor, Irian dan Aceh. Munculnya gerakan separatistis ini juga dipicu oleh berbagai kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat yang kurang tepat, kurang adil, dan kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat dari daerah-daerah tersebut.

Ancaman Bentuk Baru.

Dalam era globalisasi timbul berbagai ancaman bentuk baru yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan militer (Hankam) saja. Ancaman bentuk baru tersebut dapat berbentuk

rekayasa dari luar dan dalam negeri agar citra Indonesia jelek di dunia internasional dengan issue pelanggaran HAM, otoriter, tidak demokratis dan lain-lainnya. Ancaman bentuk baru lainnya dapat berakibat terjadinya krisis moneter dan ekonomi yang berlanjut dengan krisis kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. Ancaman bentuk baru ini bila tidak mampu diatasi, akan mengakibatkan makin terpuruknya kehidupan nasional dan terjadinya disintegrasi bangsa dan NKRI.

Kendala Daya Saing.

Dalam perdagangan bebas pada era globalisasi terdapat ketimpangan antara negara industri maju dengan negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara industri maju menguasai keunggulan teknologi, modal dan kemampuan profesional dibandingkan dengan negara berkembang yang pada umumnya hanya memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan kualitas yang masih rendah. Negara industri maju menikmati nilai tambah yang besar, sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan nilai tambah yang kecil. Keadaan yang timpang tersebut mengakibatkan daya saing barang dan jasa negara berkembang pada umumnya masih lemah. Bahkan dalam persaingan ini negara industri maju dengan dalih tuntutan HAM, demokratisasi, kelestarian hidup

dengan menggunakan standar ganda, sering mengadakan tekanan dan pembatasan terhadap produk barang dan jasa dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Peluang Kerjasama

Era perdagangan bebas mendorong kerjasama, khususnya kerjasama ekonomi dan perdagangan yang saling menguntungkan yang didasarkan saling membutuhkan dan tatanan yang adil. Kerjasama ini dapat dilaksanakan baik secara bilateral, maupun regional, dan internasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bersama. Guna memanfaatkan peluang kerjasama ini diperlukan kesetaraan diantara sesama negara bangsa, bukan dominasi negara yang satu terhadap lainnya.

Hakekat Tantangan dalam Era Reformasi.

Mengingat pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis moneter dan ekonomi serta krisis kepercayaan yang sangat berat, maka segala daya dan dana hendaknya diprioritaskan pada tantangan jangka pendek dalam rangka mengatasi krisis sebagai berikut :

Pemulihan Stabilitas Politik, Ekonomi dan Keamanan.

Dampak negatif dari gerakan reformasi berupa unjuk rasa yang cenderung ingin memaksakan kehendak, yang masih sering disertai

tindak kekerasan seperti perusakan, penjarahan dan pembunuhan, menimbulkan ketakutan warga masyarakat yang masih mengalami trauma peristiwa Mei 1998. Kriminalitas masih cenderung meningkat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keadaan tersebut memberikan indikasi bahwa Stabilitas Keamanan belum pulih.

Berbagai pendapat dan sepek terjang para tokoh reformasi, para pakar dan pemimpin Orsospol, LSM tentang pro dan kontra terhadap pemerintahan Presiden B.J. Habibie, tentang Asas Tunggal Pancasila, SI MPR, Pemilu dan SU MPR, tentang tuntutan separatistis dan lain-lain issue politik yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya di atas kepentingan nasional, memberikan indikasi belum pulihnya stabilitas politik.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang masih terpuruk belum memberikan iklim yang menghidupkan kembali proses produksi barang dan jasa sebagian besar perusahaan swasta nasional, sehingga mengakibatkan kelangkaan tersedianya barang dan jasa, serta melambungnya harga barang dan jasa. Investor dan turis asing masih enggan masuk kembali ke Indonesia. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa stabilitas ekonomi Indonesia belum pulih.

Pemenuhan Kebutuhan Sembako.

Tidak terpenuhinya kebutuhan sembako, terutama bagi golongan bawah, akan mudah sekali dihasut dan disulut oleh/oknum/kelompok tersebut untuk mengadakan per-jarahan kerusuhan massal yang lebih dahsyat bagi kepentingan politik oknum/ kelompok tersebut.

Masyarakat golongan bawah yang dari golongan yang memperoleh penghasilan marginal, para penganggur dan penduduk miskin jumlahnya sudah makin besar, bila mereka lapar akan terpaksa melakukan tindakan yang lepas kontrol dan akan terjadi tindak kekerasan secara massal.

Pemerintah yang mendapat Kepercayaan Rakyat.

Terjadinya pro dan kontra terhadap pemerintahan Presiden B.J. Habibie paling sedikit dapat ditinjau dari segi formal konstitusional dan ditinjau secara aktual. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemerintah Presiden B.J. Habibie pada saat ini belum mendapat kepercayaan rakyat sepenuhnya.

Sesuai dengan asas kedaulatan rakyat, kepercayaan rakyat secara formal/ konstitusional diperoleh melalui Pemilu dan SU-MPR. Sedangkan kepercayaan aktual termasuk kepercayaan dari luar negeri, sangat tergantung dari program dan kinerja pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam melaksanakan reformasi secara

bertahap dan konsisten, antara lain menghapus KKN dan ABS menciptakan kepastian dan tegaknya hukum, meningkatkan pelaksanaan HAM, mengatasi krisis, yang makin bersifat multidimensional, serta mampu melanjutkan pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.

Pemanfaatan potensi, kekuatan dan peluang.

Walaupun krisis moneter, ekonomi dan kepercayaan dirasakan sangat berat dan mencekam, namun bangsa Indonesia terutama para pemimpinnya harus tetap memiliki tekad, semangat dan keyakinan bahwa kita mampu keluar dari krisis, serta mampu menjamin NKRI berdasarkan Pancasila tetap utuh. Para pemimpin bangsa hendaknya dapat mendorong kembali kokohnya persatuan kesatuan nasional, mampu memanfaatkan potensi dan kekuatan bangsa, kekayaan alam, dan wilayah Indonesia, serta peluang kerjasama dalam kesetaraan dengan negara dan lembaga internasional untuk mengatasi krisis dan melanjutkan pembangunan nasional.

UPAYA PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL

Upaya pemantapan Ketahanan Nasional dalam era reformasi dan dalam krisis moneter dan ekonomi, serta krisis kepercayaan sesuai Doktrin Dasar Nasional Ketahanan Nasional adalah dengan membangun kekuatan secara komprehensif

integral untuk mengatasi tantangan ancaman dan kendala, serta memanfaatkan potensi, kekuatan dan peluang terutama dalam jangka pendek dan jangka sedang dengan prioritas sebagai berikut:

Kesadaran dan tekad bersatu

Memulihkan kesadaran dan tekad bersatu padu seluruh bangsa Indonesia untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta stabilitas ekonomi termasuk nilai rupiah terhadap dollar AS, dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia, terutama para pemimpin bangsa harus lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, suku, etnis dan daerah. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu secara konsisten meningkatkan kembali pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia yang plural, dan Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia.

Keterpaduan dan kekompakan Upaya

Menciptakan keterpaduan dan kekompakan upaya intern Pemerintah, antara Pemerintah dengan DPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, antara Pemerintah dengan ABRI, dan parpol, ormas serta tokoh masyarakat dalam menyikapi dan bertindak untuk mengatasi krisis moneter, ekonomi,

dan krisis kepercayaan. Dalam hal ini diperlukan rekonsiliasi dan konsensus nasional untuk bekerjasama melaksanakan agenda (*recovery plan*) yang disekati. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu secara konsisten meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Konsepsi Ketahanan Nasional.

Pengaturan Kemerdekaan Berserikat, Berkumpul dan Menyampaikan Pendapat.

Merumuskan dan mengundangkan perubahan/ penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis, termasuk kegiatan unjuk rasa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, agar tidak menjurus ke arah liberalisme, separatisme dan terjadinya disintegrasi bangsa dan negara. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, terwujud aturan main yang jelas, sehingga tercipta kepastian hukum dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang tanpa ragu-ragu.

Pemberantasan KKN dan ABS

Pemberantasan KKN dan ABS di lembaga pemerintah, lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat secara bertahap dan berlanjut mengacu pada kriteria yang jelas dan berdasarkan hukum, sehingga tidak terjadi unjuk rasa, hujat menghujat

yang menjurus terjadinya *anarkhi* dan pelanggaran HAM.

Pemulihan produksi dan distribusi Sembako.

Memberikan prioritas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sembako dan mengatasi pengangguran. Menanggihkan pembangunan proyek infrastruktur dan industri yang memiliki nilai tambah kecil, yang membutuhkan dana yang sangat besar. Upaya peningkatan produksi pangan dalam negeri dan kelancaran distribusinya, serta harga yang terjangkau oleh masyarakat golongan bawah, dan pemberian subsidi/ santunan yang tepat sasaran, harus merupakan komitmen semua pihak yang terkait.

Menggali dan memanfaatkan Potensi Kekayaan Alam Indonesia.

Menggali dan memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia, kemampuan SDM, dan sarana serta prasarana yang sudah dibangun, guna meningkatkan produksi pangan dan komoditi ekspor melalui agrobisnis dan *resouce based industry*. Disamping itu ekspor TKI perlu ditingkatkan pengaturannya, sehingga menghasilkan devisa yang sangat diperlukan. Sejalan dengan upaya tersebut harus ditingkatkan terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara adil, untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemusatan kekuatan ekonomi pada golongan/ etnis, monopoli, monopsoni dan

oligopoli harus dikikis habis. Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam perekonomian nasional sebagai sarana pemerataan dan pertumbuhan perlu terus ditingkatkan.

Meningkatkan Kepercayaan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan legitimasi pemerintah secara demokratis, perlu secepat mungkin diselenggarakan SI MPR, Pemilu dan SU MPR. Sejalan dengan agenda tersebut pemerintah dan DPR harus mampu menunjukkan peningkatan kinerjanya. Demikian pula ABRI harus mampu membenahi pelaksanaan Dwifungsi ABRI secara tepat guna. Dengan terpilihnya Presiden dan Wapres yang definitif secara demokratis dengan pembatasan masa jabatan 2 kali dalam SU MPR pada Desember 1999 yang akan datang, kemudian dapat dibentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mencintai dan dicintai rakyat, diharapkan bangsa Indonesia akan mampu melanjutkan pembangunan nasional dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dan Cita-cita Nasional.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

Pemerintah hendaknya mampu melaksanakan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional, serta mendukung upaya dalam mengatasi

krisis. Perwakilan R.I. di luar negeri hendaknya mampu lebih proaktif meningkatkan citra Indonesia, mencari peluang kerjasama yang saling menguntungkan, dan berbagai bantuan dalam rangka mengatasi krisis dan melanjutkan pembangunan nasional.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Hakekat reformasi adalah perbaikan kehidupan nasional secara bertahap berlanjut (secara evolusioner) yang tetap berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan dalam wadah NKRI, terutama untuk mewujudkan kehidupan politik yang makin demokratis dalam suasana keterbukaan (transparan), mengindahkan HAM, bersih dari KKN dan ABS; kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan makmur ; terciptanya kepastian dan tegaknya hukum yang berkeadilan. Reformasi bukanlah Revolusi.
- Gerakan reformasi yang didahului situasi krisis moneter dan ekonomi, berlanjut dengan krisis kepercayaan, belum dapat berjalan dengan tertib dan lancar, karena krisis masih terus berlangsung yang makin bersifat multidimensional, yang cenderung dapat membahayakan tetap utuh dan tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945.

- Wasantara dan Tannas sebagai Doktrin Dasar Nasional masih valid dan relevan sebagai acuan dalam rangka mengatasi krisis dan meluruskan gerakan reformasi.
- Dalam rangka upaya keluar dari krisis, agar gerakan reformasi dapat terus berlanjut, maka segala daya dan dana hendaknya diprioritaskan untuk mengatasi tantangan jangka pendek yaitu : Pemulihan Stabilitas Politik, Ekonomi dan Keamanan; Pemenuhan Kebutuhan Sembako; Pemerintah yang mendapat kepercayaan masyarakat ; Pemanfaatan potensi, kekuatan, dan peluang.
- Upaya Pementapan Ketahanan Nasional hendaknya diprioritaskan pada : Kesadaran dan tekad bersatu; Keterpaduan dan kekompakan upaya; Pengaturan Kemerdekaan Berserikat, Berkumpul dan Menyampaikan Pendapat; Pemberantasan KKN dan ABS; Pemulihan produksi dan distribusi sembako; Menggali dan memanfaatkan Potensi Kekayaan Alam dan SDM Indonesia; Meningkatkan kepercayaan rakyat melalui agenda politik (*recovery plan*) yang disepakati bersama; Politik Luar Negeri Bebas Aktip yang diabdikan pada kepentingan nasional.

Demikianlah sumbangan pemikiran penulis. Semoga bermanfaat bagi para Pemimpin Bangsa, Tokoh Masyarakat dan semua pihak yang terkait dalam

rangka upaya keluar dari situasi krisis yang sangat berat dan melanjutkan reformasi yang tetap berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dalam wadah NKRI.

